

**EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA DEPOK
(STUDI KASUS KETERSEDIAAN TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA DAN
TEMPAT PEMROSESAN AKHIR TAHUN 2019-2024)**

Defit Cherlin Taileleu

Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia

Email Korespondensi: defitcherlin01@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to evaluate waste management policies in Depok City in 2019-2024, especially related to the availability of Temporary Shelters (TPS) and Final Processing Sites (TPA). The waste problem in Depok City continues to increase along with population growth, urbanization, and community activities which have an impact on increasing the volume of waste generation every year. On the other hand, the available TPS and landfill capacity has not been able to keep up with the increase, causing various environmental problems such as garbage accumulation, pollution, and the emergence of illegal TPS. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The research analysis uses William N. Dunn's policy evaluation theory which includes three indicators, namely lack of utilization of performance information, ambiguity of policy objectives, and conflicting policy objectives. The results of the study show that the waste management policy in Depok City has not run optimally. The government still depends on the Cipayung Landfill which is overcapacity, while the distribution of polling stations has not been evenly distributed throughout the region. In addition, policy implementation still faces low community participation and conflicts of interest related to the construction of waste management facilities. The government has made various efforts such as the construction of Refuse Derived Fuel (RDF) facilities, the waste bank program, and D'Gober, but the implementation has not been fully effective. Therefore, a more comprehensive policy evaluation and strengthening synergy between the government and the community are needed to realize sustainable waste management in Depok City.

Keywords: policy evaluation, waste management, TPS, TPA, Depok City.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Depok tahun 2019-2024, khususnya terkait ketersediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Permasalahan sampah di Kota Depok terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan aktivitas masyarakat yang berdampak pada meningkatnya volume timbulan sampah setiap tahun. Di sisi lain, kapasitas TPS dan TPA yang tersedia belum mampu mengimbangi peningkatan tersebut, sehingga menimbulkan berbagai persoalan lingkungan seperti penumpukan sampah, pencemaran, dan munculnya TPS liar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis penelitian menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn yang meliputi tiga indikator, yaitu kurangnya pemanfaatan informasi kinerja, ambiguitas tujuan kebijakan, dan tujuan kebijakan yang saling bertentangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Kota Depok belum berjalan optimal. Pemerintah masih bergantung pada TPA Cipayung yang mengalami over kapasitas, sementara distribusi TPS belum merata di seluruh wilayah. Selain itu, implementasi kebijakan masih menghadapi rendahnya partisipasi masyarakat dan konflik kepentingan terkait pembangunan fasilitas pengelolaan sampah. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti pembangunan fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF), program bank sampah, dan D'Gober, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, diperlukan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

1

Indexed



SINTA 4



evaluasi kebijakan yang lebih komprehensif serta penguatan sinergi antara pemerintah dan masyarakat guna mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kota Depok.

Kata Kunci: evaluasi kebijakan, pengelolaan sampah, TPS, TPA, Kota Depok.

PENDAHULUAN

Persoalan tentang sampah masih menjadi salah satu tantangan yang harus segera dipecahkan di Indonesia. Sampah yang timbul dari aktivitas yang dilakukan manusia semakin bertambah volumenya seiring meningkatnya populasi penduduk, tingkat konsumsi, serta kemajuan teknologi (Sholihah, 2020:1). Sampah merupakan salah satu permasalahan besar di Indonesia yang bisa menimbulkan dampak negatif pada lingkungan maupun kesehatan penduduk. Lahirnya sampah beriringan dengan laju pertumbuhan penduduk yang cenderung meningkat setiap tahun (Ulinnuha, 2022).

Persoalan sampah di Indonesia semakin kompleks seiring bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas manusia, sehingga berdampak negatif pada lingkungan dan kesehatan. Permasalahan sampah meliputi tiga bagian yaitu pada bagian hilir, proses dan hulu. Pada bagian hilir, pembuangan sampah yang terus meningkat. Pada bagian proses, keterbatasan sumber daya baik dari masyarakat maupun pemerintah. Pada bagian hulu, berupa kurang optimalnya sistem yang diterapkan pada pemrosesan akhir (Mulasari, 2016 dalam Elamin et al. 2016:369). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan persampahan tidak hanya bersumber dari meningkatnya timbulan sampah, tetapi juga dari keterbatasan kapasitas pengelolaan serta ketidakefektifan sistem yang berjalan, sehingga diperlukan intervensi kebijakan yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

Menurut data statistik persampahan domestik Indonesia, jenis sampah plastik menduduki peringkat kedua sebesar 5.4 juta ton per tahun atau 14 persen dari total produksi sampah. Dengan demikian, plastik telah mampu menggeser sampah jenis kertas yang tadinya di peringkat kedua menjadi peringkat ketiga dengan jumlah 3.6 juta ton per tahun atau 9 persen dari jumlah total produksi sampah.(Uncategorized, 2024). Adapun data persoalan sampah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1: Data Sampah di Indonesia Berdasarkan Sumber Sampah



Sumber Infografi: SIPSN

Berdasarkan data di atas maka dapat dilihat bahwa salah satu penyumbang sampah terbesar yaitu dari aktivitas rumah tangga. Hal ini diperkuat berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di tahun 2023, ada 60,44% sampah berasal dari aktivitas rumah tangga dan kemudian disusul 11,63% dari aktivitas pasar (Indonesia Asri, 2025). Di sisi lain, dari data SIPSN terlihat jelas bahwa rumah tangga merupakan kontributor terbesar dalam produksi sampah, menyumbang 60.44% dari total sampah. Sumber sampah signifikan lainnya adalah pasar (11.63%) dan kawasan (9.73%). Perkantoran dan perniagaan memiliki kontribusi yang relatif lebih kecil, masing-masing 6.02% dan 6.47%, sementara fasilitas publik (3.73%) dan sumber "Lain-lain"

(1.98%) merupakan penyumbang terkecil. Data ini menunjukkan bahwa upaya pengelolaan sampah harus difokuskan pada sektor rumah tangga untuk mencapai dampak yang paling signifikan dalam pengurangan dan penanganan sampah.

Sampah merupakan masalah yang aktual sejak lama bagi Negara Indonesia, utamanya bagi Perkotaan karena pengaruh dari kondisi sosial, budaya serta ekonomi masyarakat setempat, hal ini dapat dilihat dengan adanya pertumbuhan penduduk, peningkatan aktivitas serta perubahan pola konsumsi masyarakat yang secara langsung menimbulkan pertambahan volume, jenis, dan karakteristik sampah (Rahmawati, dkk., 2021:1). Permasalahan yang ditimbulkan oleh sampah antara lain adalah hilangnya nilai estetika lingkungan seperti pencemaran tanah, air dan udara, munculnya sumber penyakit dan kemungkinan terjadinya bencana alam dalam jangka panjang, misalnya: Permasalahan sampah yang ada saat ini (Kanda & Sari 2024:62).

Salah satu tantangan utama yang timbul akibat limbah di Kota Depok adalah penurunan mutu lingkungan, terutama di sekitar tempat pembuangan sampah (TPS maupun TPA). Situasi ini sering menimbulkan ketegangan sosial dengan penduduk setempat, dari sudut pandang kesehatan, tumpukan limbah dapat menjadi sumber penyakit. Beberapa area Depok, seperti di sekitar TPS liar atau TPS yang tidak tertutup, sering kali muncul aroma tidak sedap dan genangan air lindi yang mencemari ekosistem. Ini berpotensi menyebabkan warga terkena penyakit seperti sesak napas, gatal-gatal, diare, dan penyakit lainnya akibat lingkungan yang kotor serta banyaknya serangga seperti lalat dan nyamuk.

Sampah adalah masalah nyata yang dihadapi masyarakat setiap hari dan hingga saat ini belum sepenuhnya teratasi. Di Kota Depok, masalah ini semakin rumit dengan bertambahnya jumlah penduduk dan urbanisasi yang menyebabkan peningkatan jumlah sampah setiap tahunnya. Menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok, jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat terus meningkat, sementara sarana pengelolaan sampah, seperti Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), tidak meningkat secara seimbang. Akibatnya, banyak TPS yang kelebihan muatan, dan sebagian warga harus membuang sampah sembarangan karena akses ke TPS resmi terbatas. Situasi ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah yang ada belum sepenuhnya mengatasi tantangan yang ada, terutama dalam hal penyediaan fasilitas dan distribusinya yang merata. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengelolaan sampah, khususnya dalam hal ketersediaan dan distribusi TPS serta kapasitas TPA, agar pengelolaan sampah di Kota Depok tetap berkelanjutan.

Setidaknya data simbulan sampah di Kota Depok dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Data Timbulan Sampah di Kota Depok Tahun 2019-2024

Tahun	Timbulan Sampah Tahunan (ton)
2019	553,449.64
2020	472,854.23
2021	479,660.75
2022	488.270,5
2023	462,011.89
2024	489.304,5

Sumber: Hasil Olahan Peneliti 2026

Berdasarkan data timbulan sampah tahunan di Kota Depok dari tahun 2019 hingga 2024, terlihat bahwa jumlah sampah mengalami perubahan setiap tahunnya. Pada tahun 2019, jumlah sampah tercatat paling tinggi, yaitu sebesar 553.449,64 ton. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 472.854,23 ton, kemungkinan karena pembatasan aktivitas masyarakat selama pandemi. Tahun 2021 mengalami sedikit kenaikan menjadi 479.660,75 ton, dan terus meningkat pada tahun 2022 menjadi 488.270,5 ton. Meski begitu, jumlah sampah kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 462.011,89 ton.

Lalu pada tahun 2024, volume sampah meningkat lagi menjadi 489.304,5 ton, antara lain karena lonjakan sampah saat masa Lebaran. Data ini menunjukkan bahwa jumlah sampah di Kota Depok cenderung berubah-ubah dan tetap menjadi tantangan besar dalam pengelolaannya.

Kebijakan tentang pengelolaan sampah di Kota Depok pada Peraturan Daerah Depok No. 13 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah. Dalam Perda tersebut, pasal 22 ayat 1-3 berbunyi; (1) Pemerintah Kota, masyarakat, dan badan dapat memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS atau UPS di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus sesuai kebutuhan. (2) Penyediaan TPS atau UPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penyediaan TPS atau UPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang kawasan.

Kondisi dimana over kapasitas dari TPS dan TPA menjadi penting untuk dievaluasi, sehingga permasalahan sampah di Kota Depok dapat terselesaikan. Merujuk pada indikator evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn (2018) dalam pendekatan *evaluasi teoritis keputusan*, terdapat tiga indikator utama yang digunakan, yaitu kurangnya pemanfaatan dan non-pemanfaatan informasi kinerja Indikator ini menilai sejauh mana informasi dari evaluasi kebijakan sebelumnya dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan baru. Dalam konteks Kota Depok, meskipun sudah ada evaluasi mengenai over kapasitas TPA Cipayung sejak 2014, rekomendasi untuk memperluas lahan atau membangun TPA baru belum terealisasi. Pemerintah masih bergantung pada TPA Cipayung, sehingga masalah terus berulang.

Ambiguitas tujuan kinerja Indikator ini melihat sejauh mana tujuan kebijakan jelas dan tidak saling bertentangan. Di Depok, tujuan pengelolaan sampah adalah mengurangi timbulan melalui prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) serta mewujudkan lingkungan bersih dan sehat. Namun, implementasi masih dominan pada pola kumpul-angkut-buang. Program seperti bank sampah dan *Refuse-Derived Fuel* (RDF) ada, tetapi belum masif sehingga tujuan kebijakan tampak kabur antara pengurangan di sumber dan pembuangan akhir.

Tujuan-tujuan yang saling bertentangan, indikator ini mengukur konflik atau perbedaan kepentingan antar pemangku kebijakan. Di Kota Depok, pemerintah daerah berupaya menyediakan TPS dan menjaga kelestarian lingkungan, tetapi di sisi lain, masyarakat menolak pembangunan TPS atau TPA baru di sekitar mereka karena khawatir terhadap dampak kesehatan dan pencemaran. Hal ini menimbulkan benturan antara kebutuhan teknis pemerintah dan aspirasi masyarakat, yang pada akhirnya menghambat pemerataan fasilitas.

Merujuk pada kondisi dilapangan Kota Depok tahun 2019-2024, ketiga indikator ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah masih menghadapi persoalan serius. Informasi dari evaluasi sebelumnya kurang dimanfaatkan, tujuan kebijakan masih belum tegas antara pengurangan sampah di sumber atau pengelolaan di TPA, serta adanya konflik kepentingan antara pemerintah dan masyarakat mengenai lokasi fasilitas TPS/TPA. Situasi ini mengakibatkan TPS dan TPA yang ada tidak mampu menampung volume sampah yang terus meningkat, sehingga menimbulkan pencemaran, penolakan sosial, hingga risiko kesehatan di berbagai wilayah Kota Depok.

Permasalahan evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Depok dapat dijelaskan melalui tiga indikator utama dalam teori evaluasi keputusan Dunn (2018), yaitu kurangnya pemanfaatan dan non-pemanfaatan informasi kinerja. terlihat dari lemahnya tindak lanjut terhadap hasil evaluasi kebijakan sebelumnya. Sejak TPA Cipayung mengalami kelebihan kapasitas pada tahun 2014, berbagai kajian dan rekomendasi telah disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup maupun lembaga swadaya masyarakat, namun belum diikuti dengan langkah konkret seperti pembangunan TPA baru atau peningkatan fasilitas TPS. Pemerintah masih bergantung pada satu lokasi pembuangan akhir, sehingga permasalahan berulang setiap tahun.

Ambiguitas tujuan kebijakan tampak dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah yang belum memiliki fokus jelas antara pengurangan sampah di sumber (melalui prinsip 3R) dan peningkatan

kapasitas pengolahan di TPA. Program seperti bank sampah dan *Refuse-Derived Fuel* (RDF) memang telah dijalankan, namun belum terintegrasi secara sistematis dengan tujuan utama kebijakan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian di tingkat pelaksana dan masyarakat tentang arah kebijakan pengelolaan sampah yang sebenarnya ingin dicapai.

Tujuan-tujuan yang saling bertentangan muncul dari benturan kepentingan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah berupaya memperluas atau menambah TPS dan TPA untuk menampung timbulan sampah, namun masyarakat sering menolak pembangunan fasilitas tersebut di sekitar permukiman mereka karena khawatir terhadap pencemaran dan dampak kesehatan. Konflik ini menghambat pemerataan fasilitas dan efektivitas kebijakan secara keseluruhan.

Dengan demikian, ketiga indikator tersebut menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Depok bukan hanya terletak pada aspek teknis, tetapi juga pada pemanfaatan hasil evaluasi, kejelasan tujuan kebijakan, serta keselarasan kepentingan antar pemangku kebijakan dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kebijakan yang lebih komprehensif agar permasalahan pengelolaan sampah dapat diatasi secara efektif dan berkelanjutan. Penerapan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Depok saat ini dilakukan melalui berbagai program yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) sebagai instansi utama. Salah satu inisiatif utama adalah pembangunan fasilitas *Refuse Derived Fuel* (RDF) di TPA Cipayung yang mulai dirintis sejak tahun 2022.

Pengelolaan sampah di Kota Depok, khususnya terkait ketersediaan dan distribusi Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) pada tahun 2019-2024, masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Permasalahan seperti keterbatasan jumlah dan kapasitas TPS dan TPA, meningkatnya volume timbulan sampah, serta dampak lingkungan yang ditimbulkan menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas kebijakan yang telah dijalankan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menjawab sejauh mana kebijakan tersebut telah dilaksanakan sesuai tujuan, apa saja kendala yang dihadapi, serta bagaimana dampaknya terhadap pengelolaan sampah di Kota Depok.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menjawab sejauh mana kebijakan tentang pengolahan sampah di Kota Depok telah dilaksanakan sesuai tujuan. Menurut Sugiyono (2020), pendekatan penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif dapat bersifat temuan petensi dan masalah, keunikan obyek, makna suatu peristiwa, proses dan interaksi sosial, kepastian kebenaran data, konstruksi fenomena, temuan hipotesis (Sugiyono, 2020:25-26).

Penelitian ini difokuskan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan pengelolaan sampah di Kota Depok telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, khususnya terkait ketersediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) pada periode 2019-2024, serta untuk mengidentifikasi kendala yang muncul dan dampaknya terhadap efektivitas pengelolaan sampah.

PEMBAHASAN

Evaluasi Pemerintah Daerah Terhadap Penyediaan TPS dan TPA Kota Depok 2019-2024

Pengelolaan sampah di Kota Depok masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan secara optimal. Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat menyebabkan volume sampah terus meningkat setiap tahun. Kondisi tersebut tidak diimbangi dengan ketersediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang memadai sehingga menimbulkan berbagai

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

5

Indexed



SINTA 4



permasalahan lingkungan seperti penumpukan sampah, pencemaran, dan munculnya TPS liar di beberapa wilayah.

Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) telah menjalankan berbagai program pengelolaan sampah seperti bank sampah, program D'Gober (Depok Go Bersih), serta pembangunan fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) di TPA Cipayung. Namun dalam implementasinya, kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait keterbatasan kapasitas TPA, distribusi TPS yang belum merata, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori Evaluasi Teoritis Keputusan William N. Dunn (2018) dengan tiga indikator utama yaitu kurangnya pemanfaatan informasi kinerja, ambiguitas tujuan kebijakan, dan tujuan kebijakan yang saling bertentangan.

Kurangnya Pemanfaatan Informasi Kinerja

Pemanfaatan informasi kinerja adalah proses penggunaan data, hasil evaluasi, atau informasi dari pelaksanaan suatu program atau kebijakan sebelumnya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan perbaikan kebijakan selanjutnya. Pemanfaatan pengukuran kinerja mengandung suatu pertimbangan mengenai usaha untuk memperbaiki efisiensi, dan menimbulkan interpretasi tentang bagaimana suatu program atau kegiatan dapat didefinisikan, diukur, dan dapat dibandingkan (Diptyana & Basuki, 2010:234).

Kurangnya pemanfaatan informasi kinerja terlihat dari belum optimalnya tindak lanjut pemerintah terhadap hasil evaluasi kebijakan sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian, permasalahan over kapasitas TPA Cipayung sebenarnya telah terjadi sejak tahun 2014. Namun hingga tahun 2024 pemerintah masih bergantung pada TPA tersebut sebagai satu-satunya lokasi pembuangan akhir sampah di Kota Depok. Berbagai rekomendasi mengenai pembangunan TPA baru maupun perluasan lahan TPA Cipayung belum terealisasi secara maksimal. Akibatnya, volume sampah yang masuk ke TPA terus meningkat setiap harinya. Kondisi tersebut menyebabkan penumpukan sampah yang berdampak pada pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat sekitar.

Selain itu, distribusi TPS di Kota Depok juga masih belum merata. Beberapa wilayah memiliki fasilitas TPS yang terbatas sehingga masyarakat membuang sampah di lahan kosong maupun pinggir jalan. Hal tersebut menunjukkan bahwa hasil evaluasi mengenai kebutuhan fasilitas pengelolaan sampah belum dimanfaatkan secara optimal dalam pengambilan kebijakan. Pemerintah memang telah melakukan beberapa upaya seperti pembangunan fasilitas RDF dan pengembangan bank sampah. Namun program tersebut belum mampu mengurangi volume sampah secara signifikan karena pelaksanaannya masih belum merata di seluruh wilayah Kota Depok.

Ambiguitas Tujuan Kebijakan

Ambiguitas kebijakan dalam implementasi muncul dari sejumlah sumber, tetapi secara umum dapat dikategorikan ke dalam dua kategori ambiguitas tujuan dan ambiguitas cara. Dalam model top-down, kejelasan tujuan merupakan variabel independen penting yang secara langsung memengaruhi keberhasilan kebijakan. Ambiguitas tujuan dianggap dapat menyebabkan kesalahpahaman dan ketidakpastian, sehingga seringkali menjadi penyebab kegagalan implementasi. Posisi para penganut top-down cukup eksplisit kebijakan harus didorong ke arah kejelasan tujuan yang lebih baik (Matland, 1995:157-158).

Ambiguitas tujuan kebijakan terlihat dari belum jelasnya arah kebijakan pengelolaan sampah di Kota Depok. Pemerintah memiliki tujuan untuk mengurangi volume sampah melalui prinsip 3R (reduce, reuse, recycle). Namun pada pelaksanaannya, sistem pengelolaan sampah masih didominasi oleh pola kumpul-angkut-buang ke TPA. Program seperti bank sampah dan D'Gober sebenarnya bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian, tingkat partisipasi masyarakat masih rendah karena kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya pemilahan sampah dari sumbernya.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

6



Di sisi lain, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kapasitas TPA melalui pembangunan fasilitas RDF di TPA Cipayung. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Kota Depok masih belum memiliki fokus yang jelas antara pengurangan sampah dari sumber atau peningkatan kapasitas pengelolaan di TPA. Ketidakjelasan tujuan kebijakan tersebut menyebabkan implementasi program pengelolaan sampah belum berjalan efektif. Masyarakat masih memandang bahwa pengelolaan sampah sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah sehingga kesadaran dalam memilah dan mengurangi sampah masih rendah.

Tujuan Kebijakan Yang Saling Bertentangan

Tujuan kebijakan yang saling bertentangan terlihat dari adanya konflik kepentingan antara pemerintah dan masyarakat terkait pembangunan TPS dan TPA. Pemerintah Kota Depok berupaya menambah fasilitas pengelolaan sampah guna mengatasi peningkatan volume sampah, namun masyarakat sering menolak pembangunan TPS maupun TPA di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka. Penolakan tersebut terjadi karena masyarakat khawatir terhadap dampak pencemaran lingkungan, bau tidak sedap, serta risiko gangguan kesehatan. Konflik ini menyebabkan pemerintah mengalami kesulitan dalam memperluas fasilitas pengelolaan sampah maupun menentukan lokasi pembangunan TPS baru.

Selain itu, keterbatasan lahan di Kota Depok juga menjadi kendala dalam pembangunan fasilitas pengelolaan sampah. Tingginya tingkat urbanisasi menyebabkan lahan kosong semakin terbatas sehingga pemerintah kesulitan menyediakan lokasi baru untuk TPS dan TPA. Berdasarkan hasil penelitian, konflik antara kebutuhan pemerintah dalam menyediakan fasilitas pengelolaan sampah dan penolakan masyarakat menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga aspek sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan komunikasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan agar pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Upaya Perbaikan Oleh Pemerintah Kota Depok Berkaitan Dengan Masalah TPS Dan TPA

Dalam mengatasi permasalahan pengelolaan sampah, Pemerintah Kota Depok telah melakukan berbagai upaya perbaikan melalui program dan kebijakan pengelolaan sampah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pembangunan fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) di TPA Cipayung. Program ini bertujuan mengurangi volume sampah dengan mengubah sampah menjadi bahan bakar alternatif sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap sistem pembuangan akhir.

Selain pembangunan RDF, Pemerintah Kota Depok juga mengembangkan program bank sampah di berbagai wilayah. Program ini bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilah sampah rumah tangga, khususnya sampah anorganik seperti plastik dan kertas yang masih memiliki nilai ekonomi. Melalui program bank sampah, masyarakat diharapkan mampu mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPS dan TPA.

Pemerintah Kota Depok juga menjalankan program D'Gober (Depok Go Bersih) sebagai upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Program ini melibatkan aparat wilayah, RT/RW, serta masyarakat dalam kegiatan kerja bakti dan pengawasan kebersihan lingkungan secara rutin.

Selain itu, Pemerintah Kota Depok bekerja sama dengan berbagai pihak dalam program *Zero Waste City* dan *Plastic Smart Cities* untuk meningkatkan edukasi lingkungan dan pengurangan sampah plastik. Program tersebut bertujuan membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Depok masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan jumlah TPS, over kapasitas TPA Cipayung, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kebijakan yang lebih

komprehensif serta penguatan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta agar pengelolaan sampah di Kota Depok dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Kota Depok tahun 2019-2024 masih belum berjalan optimal. Permasalahan utama tidak hanya terletak pada keterbatasan TPS dan TPA, tetapi juga lemahnya pemanfaatan hasil evaluasi kebijakan, ketidakjelasan tujuan kebijakan, dan konflik kepentingan antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan pengelolaan sampah di Kota Depok tahun 2019–2024 masih belum berjalan optimal. Permasalahan utama terletak pada keterbatasan dan distribusi TPS yang belum merata serta over kapasitas TPA Cipayung yang menyebabkan penumpukan sampah dan pencemaran lingkungan. Berdasarkan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn, ditemukan tiga permasalahan utama, yaitu kurangnya pemanfaatan hasil evaluasi kebijakan, ketidakjelasan tujuan kebijakan antara pengurangan sampah dan peningkatan kapasitas TPA, serta adanya konflik kepentingan antara pemerintah dan masyarakat terkait pembangunan fasilitas pengelolaan sampah. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti pembangunan RDF, program bank sampah, dan D’Gober, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kebijakan yang lebih komprehensif serta peningkatan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat agar pengelolaan sampah di Kota Depok dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Elamin, M. Z., Ilmi, K. N., Tahriah, T., Ahmad, Y., & Yanuar, Z. (2016). Analysis of waste management in the village of Disanah, District of Sreseh. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 368–375.
- Gogik, B., Rahmawati, A. F., & Syamsu, F. D. (2021). Analisis pengelolaan sampah berkelanjutan pada wilayah perkotaan di Indonesia. *Jurnal Binawakya*, 8(1), 1–12.
- Indonesia Asri. (2025). *Ini data sampah di Indonesia tahun 2025*. Retrieved from <https://indonesiaasri.com/edukasi/data-sampah-di-indonesia/>
- Kanda, A. S., & Sari, C. P. (2024). Analisis permasalahan dan kebijakan penanggulangan sampah di daerah Pajajaran Kota Bandung. *Jurnal Lingkungan dan Kebijakan Publik*, 2(1).
- Sholihah, K. K. A. (2020). Kajian tentang pengelolaan sampah di Indonesia. *Kajian Tentang Pengelolaan Sampah di Indonesia*, 3(3), 1–9.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian pariwisata (Kuantitatif, kualitatif, kombinasi, R&D)*. Alfabeta.
- Kompasiana. (2022). *Fenomena sampah di Indonesia yang kian menggunung, apakah laju pertumbuhan penduduk juga menjadi faktornya?* Retrieved June 21, 2022, from <https://www.kompasiana.com/firdaulinnuha/62b100d2bb448629196bc928/fenomena-sampah-di-indonesia-yang-kian-menggunung-apakah-laju-pertumbuhan-penduduk-juga-menjadi-faktornya>
- INSWA. (2024). *Fenomena sampah plastik di Indonesia*. Retrieved from <https://inswa.or.id/fenomena-sampah-plastik-di-indonesia/>